



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DAMANHURI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN
3. NHK : 524802

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

690.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m²/120 m² di KOTA SERANG, LAINNYA Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 200 m² di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/40 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/48 m² di KOTA SERANG, LAINNYA Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 403 m² di KAUR, WARISAN Rp. 25.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di SERANG, LAINNYA Rp. 130.000.000
7. Tanah Seluas 326 m² di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
8. Tanah Seluas 1151 m² di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

78.500.000

1. MOTOR, HONDA NF100SLD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA NF100 D (SUPRA X) Tahun 2005, LAINNYA Rp. 1.500.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S (F700REGMMFJ) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.688.138
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	772.188.138
III. HUTANG	Rp.	82.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	689.988.138

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.